Jurnal JISIPOL
Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung
Volume 7, Nomor 3, November 2023 (32-48)
(P-ISSN 2087-474X)

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA KONSERVASI HUTAN MANGROVE DI KOTA SERANG TAHUN 2017-2022

[1]Muhammad Iqbal, [2]M. Dian Hikmawan

[1]Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten
miqbalen8@gmail.com

[2]Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten
dian.hikmawan@untirta.ac.id

Received 1 Juni 2023; Revised: 1 November 2023; Accepted: 2 November 2023; Published: November 2023; Available online: November 2023

ABSTRAK

Collaborative Governance yang dilakukan oleh Wetlands International Indonesia dalam upaya konservasi hutan mangrove akibat deforestasi dilakukan dengan berkolaborasi dengan pemerintah dan juga *stakeholder* terkait dengan dukungan untuk pembangunan berkelanjutan serta untuk menyelamatkan hutan mangrove. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *collaborative governance* dari Ansell & Gash yang terdiri dari lima tahap seperti *face to face dialogue, trust building, commitment to process, share understanding,* dan *intermediate outcome.* Selain itu, peneliti juga menggunakan teori pendukung yaitu teori pembangunan berkelanjutan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer melalui observasi dan wawancara serta didukung oleh data sekunder melalui studi pustaka. Pemilihan informan peneliti menggunakan teknik *purposive.* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara Wetlands International Indonesia dengan *stakeholder* dilakukan dengan pertemuan secara langsung membahas mengenai hutan mangrove di Kota Serang serta ketiadaan hukum yang kemudian melahirkan rasa percaya serta kesepahaman untuk mengupayakan konservasi hutan mangrove dari deforestasi dan kemudian pada akhirnya kolaborasi tersebut menghasilkan program-program serta aturan hukum yang mendukung upaya konservasi mangrove. Selain itu, kolaborasi tersebut juga menghasilkan aktor lokal yang diharapkan dapat melanjutkan upaya-upaya konservasi akibat deforestasi hutan mangrove di Kota Serang sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Konservasi Mangrove, Pembangunan Berkelanjutan, Aktor Lokal

PENDAHULUAN

Isu lingkungan saat ini menjadi hal yang sangat sering didengar. Permasalahan lingkungan yang terjadi kemungkinan merupakan ulah dari tangan manusia, karena kehidupan manusia selalu berdampingan dengan lingkungannya (Sutiyanti et al., 2016). Kepedulian terhadap lingkungan

berada dalam tingkat yang memprihatinkan, hal ini memberikan dampak langsung terhadap lingkungan sekitar, sehingga permasalahan ini menjadi semakin pelik dan kompleks. Pada dasarnya, hal ini disebabkan oleh perilaku yang berfokus hanya pada kebutuhan saat ini dan tidak memperhitungkan masa depan generasi berikutnya (Kutanegara et al., 2018). Perusakan dan pencemaran lingkungan hidup menjadi dua hal esensial yang menjadi pokok permasalahan lingkungan (Zoerain, 2009). Isu kerusakan lingkungan tidak bisa dipisahkan dari isu sosial, politik, ekonomi, dan hukum (Fadli et al., 2016). Vegetasi mangrove merupakan vegetasi lahan basah di sekitar wilayah pesisir, vegetasi ini memiliki fungsi ekologis dan ekonomi. Mangrove dengan beragam manfaatnya sering kali berperan penting dalam memengaruhi tingkat dan laju perekonomian pedesaan yang berada di kawasan pesisir pantai (Osmaleli et al., 2014). Provinsi Banten menjadi salah satu wilayah yang masih memiliki kawasan mangrove. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1. Sebaran Mangrove di Banten

Provinsi	**Kab/Kota**	**Dalam Kawasan**			**Jumlah dalam Kawasan**	**Luar Kawasan**			**Jumlah Luar Kawasan**	**Jumlah**
		Mangrove Jarang	Mangrove Sedang	Mangrove Lebat		Mangrove Jarang	Mangrove Sedang	Mangrove Lebat		TOTAL (Ha)
Banten	**Kota Cilegon**							73.59	73.59	73.59
	Kota Serang			33.41	33.41	3.14	2.05	39.56	44.75	78.16
	Kab. Pandeglang	102.38	188.90	1,649.47	1,940.75	0.53	1.90	68.92	71.36	2,012.11
	Kab. Serang	2.43	10.92	29.45	42.80	15.04	94.23	468.22	577.49	620.29
	Kab. Tangerang	355.89	46.19	26.25	428.32	63.12	15.57	35.58	114.27	542.60
Banten Total		**460.70**	**246.01**	**1,738.58**	**2,445.29**	**81.84**	**113.75**	**685.88**	**881.47**	**3,326.76**

Sumber: Hasil olah data dari Direktorat Konservasi Tanah dan Air (2020)

Tabel mengandung informasi yakni luas sebaran mangrove pada Provinsi Banten mencapai 3,326.6 (Ha), yang dimana jumlah dalam kawasan nya seluas 2,44.20 (Ha) mecakup mangrove jarang seluas 460.70 (Ha), mangrove sedang seluas 246.01 (Ha), mangrove lebat seluas 1,738.58 (Ha) lalu untuk jumlah luas di luar kawasan seluas 881.47 (Ha) mencakup mangrove

jarang seluas 81.84 (Ha), mangrove sedang seluas 113.75 (Ha) dan mangrove lebat seluas 685.88 (Ha). Selain itu, dapat dilihat data laju deforestasi mangrove tahun 2009-2020 (Ha) pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Data Laju Deforestasi Mangrove Tahun 2009-2020

NO	PROVINSI	TIPE HUTAN	TAHUN							
			2009-2011	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
1	BANTEN	PRIMER	-	-	-	-	-	-	-	-
		SEKUNDER	-	-	-	-	-	94.7	113.9	2.3

Sumber: Hasil Olah Data dari Ditjen Planologi Kementerian LHK (2021)

Dari Tabel 2 bisa kita liat bahwa laju deforestasi di Provinsi Banten pada hutan premier mengalami deforestasi pada tahun 2016-2017 seluas 94.7 Ha lalu pada tahun 2017-2018 mengalami deforestasi seluas 113.9 dan pada tahun 2018-2019 mengalami deforestasi seluas 2.3 Ha. Yang dimana dari data pada tabel tersebut mengalami pengurangan luas area wilayah deforrestasi dari tahun 2017 sampai 2019. Lebih lanjut, kawasan lahan mangrove yang terdapat di pesisir Banten adalah kawasan yang sangat rentan terhadap ancaman kerusakan, hal ini dapat diamati dari kerusakan ekosistem mangrove yang terjadi di beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017, pesisir teluk Banten telah mengalami sebanyak 350 meter jangkauan abrasi dengan rata-rata laju abrasi sepanjang 2,64 meter dan laju abrasi maksimum sepanjang 7,72 meter (Lusiana, 2017).

Pengelolaan Mangrove di Kota Serang menjadi suatu persoalan yang sangat serius. Wetlands International Indonesia (WII) merupakan salah organisasi lingkungan hidup menemukan: (1) Erosional pesisir potensial / abrasi pada posisi pesisir yang berbeda; (2) Frekuensi bencana (*Flood Rhob,* kurangnya intrusi air bersih/air laut, waktu yang ekstrem) di daerah pesisir yang cukup tinggi; (3) Kontaminasi yang tinggi dari kontaminan limbah industri, serta limbah yang berasal dari meningkatnya area Indera; (4) Jumlah potensi kerusakan yang disebabkan oleh genangan air karena abrasi dan peningkatan tingkat laut akibat perubahan iklim (termasuk lahan pertanian makanan abadi); (5) Bukan area optimal dari sabuk hijau (*green belt)*, baik di wilayah pesisir dan perbatasan pantai, dan; (6) Rehabilitasi ekstrem belum dilakukan. Lebih lanjut, WII melakukan upaya menjaga dan merawat berkembangnya ekosistem Mangrove di pesisir Serang dengan cara mensosialisasikan masyarakat pesisir betapa pentingnya mengelola ekosistem Mangrove dan melakukan tindakan kerja sama dengan pemerintah setempat. Bentuk kerja sama tersebut dapat dilihat dari hasil olah data peneliti dari berbagai sumber yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Kerja sama Stakeholder dalam Konservasi Lahan Mangrove Kota Serang

NO	*STAKEHOLDER*	*PERAN*
1	Wetlands International Indonesia	Melakukan kegiatan rehabilitasi dan restorasi kawasan pesisir di Kota Serang.
2	Bappeda Kota Serang	Melakukan perumusan kebijakan dan perencanaan daerah terkait pengelolaan pesisir.
3	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang	Melakukan pelestarian lingkungan hidup, manajemen lingkungan dan rehabilitasi kawasan pantai.
4	Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang	Melakukan pembangunan infrastruktur dan menjamin ketersediaan SDA.
5	Dinas Pariwisata Kota Serang	Mendukung dan mempromosikan potensi wisata yang terdapat di Kota Serang.
6	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten	Penyusunan zona dan tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, rehabilitasi kawasan pesisir, penyuluhan dan pembinaan, koordinasi dan mitigasi pesisir.
7	Masyarakat	Ikut terlibat dalam kegiatan pengembangan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan.

Sumber: Hasil Olah data dari Berbagai Sumber (2022)

Kerja sama atau kolaborasi yang terbangun antar aktor-aktor yang terlibat menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena pembahasan mengenai pengelolaan Mangrove sebenarnya bisa saja dilakukan antar kedua aktor yaitu pemerintah dan masyarakat sekitar. Namun, yang terjadi di lapangan WII yang memulai prosesi kolaborasi ini terbentuk, dalam penelitian ini akan fokus kepada pengelolaan konservasi lahan kawasan hutan Mangrove dikaitkan dengan *collaborative governance.* Beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan yang menjadi salah satu rujukan dari peneliti seperti: (Gunawan, 2020; Astari, et al., 2019; Lestari, 2018)

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan tentang *Collaborative Governance*

Collaborative governance ialah kerangka yang di dalamnya terdapat keterlibatan antara beberapa pihak yaitu *civil society,*

governance dan *private sector*. Mereka berada pada tatanan yang setara dan dalam negara demokrasi, ketiga unsur tersebut mengedepankan kepentingan publik (masyarakat) (Dwiyanto, 2015). Ketika masyarakat berkembang pesat dan permasalahan yang dihadapi pemerintah lebih kompleks, kemunculan paradigma *collaborative governance* dinilai menjadi salah satu terobosan baru dalam menanggulangi berbagai persoalan publik. Pemerintah memiliki berbagai keterbatasan; biaya, waktu, sumber daya, dsb, sehingga membutuhkan kolaborasi dengan berbagai aktor-aktor lain di luar pemerintahan (Charalabidis et al., 2012). *Collaborative governance* ialah salah satu konsep terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan atau biasa disederhanakan menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif. Ansell dan Gash menyebutkan bahwa *collaborative governance* ialah jenis pemerintahan yang melibatkan beberapa struktur lain di mana aktor publik dan swasta bekerja sama dengan kolektif dan menjalani proses tertentu untuk menetapkan hukum dan aturan guna memenuhi kebutuhan publik (Ansell & Gash, 2007).

Ansell & Gash (2007) menunjukkan *collaborative governance* dilakukan melaui beberapa tahapan untuk mempertimbangkan dan memperhatikan strategi yang akan ditempuh di lapangan. Adapun tahapan tersebut antara lain yaitu: *Pertama, Face to Face Dialogue* dimana Dialog tatap muka atau komunikasi langsung penting dilakukan dalam tahapan awal membangun *collaborative governance*. *Stakeholder* yang terlibat baiknya bertemu untuk membahas dan mengidentifikasi seluruh peluang yang akan dilakukan untuk mencapai keuntungan bersama. *Kedua, Trust Building* dimana Pembangunan rasa percaya antara satu struktur dengan struktur lainnya ialah langkah yang harus diambil oleh masing-masing struktur. Dibutuhkan rasa percaya dan pengenalan karakter antar unsur yang terlibat. *Ketiga, Commitmen to Process* dimana Komitmen yang dibutuhkan dan dibentuk dalam tahapan *collaborative governance* ditujukan untuk motivasi setiap unsur terlibat secara aktif dan mencegah resiko-resiko yang mungkin akan terjadi. *Keempat, Share Understanding* dimana *Stakeholder* yang terlibat harus berbagi pemahaman mengenai apa yang akan dicapai dalam program. Saling berbagai pemahaman tersebut dapat ditungkan melalui visi, misi dan langkah kerja yang akan ditempuh kedepannya. *Kelima, Intermediate Outcomes* dimana Hasil lanjutan pada *collaborative governance* dapat dilihat dalam output yang ada. Hal ini menjadi proses paling kritis dan esensial dalam mengembangkan momentum dalam keberhasilan suatu kerja sama.

Tinjauan tentang Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan ialah upaya mengoptimalisasi kebutuhan dan memenuhi kebutuhan generasi

yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan terintegrasi dengan berbagai aspek seperti aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan dan aspek etika secara bersinergi sehingga makhluk hidup lainnya dan generasi manusia yang akan datang dapat hidup dengan rasa aman dan tanpa batas. Pembangunan berkelanjutan dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan alam juga lingkungan (Ordonez & Duinker, 2010). Pembangunan berkelanjutan harus melakukan pengembangan terhadap konservasi air, tanah, sumber daya genetik dan tanaman agar tidak menyebabkan degradasi lingkungan menggunakan teknologi yang tepat guna, inklusif dan dapat diterima secara sosial dan ekonomi (FAO, 2011).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam proses penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan ditujukan untuk memperjelas gambaran secara sistematik dan akurat berdasarkan pada fakta dan kondisi aktual ekosistem Mangrove di Kota Serang. Selain itu, ditujukan pula untuk melihat bagaimana kebijakan yang digunakan dalam melakukan *collaborative governance*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian melalui data primer dengan melalui tahapan dokumentasi, wawancara, dan observasi langsung di lapangan. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui literatur atau bahan tulisan ilmiah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive* yakni memilih dan menetapkan informan penelitian dengan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian ini. Penentuan informan yang akan menjadi subjek dalam penelitian ini berdasarkan dari kriteria informan yang ditulis oleh penulis antara lain DLHK Kota Serang, WII, Akademisi dan Masyarakat Pesisir Serang.

PEMBAHASAN

Collaborative Governance terhadap Konservasi Hutan Mangrove di Kota Serang

Melihat dari akibat deforestasi hutan Mangrove maka langkah awal yang dilakukan oleh WII adalah mengadakan komunikasi melalui tahap awal yaitu lokakarya yang bertajuk "penguatan kebijakan daerah untuk perlindungan ekosistem Mangrove Kota Serang" acara tersebut dihadiri oleh beberapa *stakeholders'* yang diadakan di Hotel Amaris Kota Serang pada 19 oktober 2017. Beberapa yang hadir dalam acara tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4. Lokakarya Wetlands International Indonesia 2017 di Kota Serang

No	*Instansi/Organisasi*	*Materi*
1	DLHK Kota Serang	1. Tingginya potensi erosi pantai/abrasi di beberapa lokasi pesisir Kota Serang.
2	Wetlands International Indonesia	

3	Bappeda Kota Serang	2. Frekuensi bencana (Banjir Rhob, Kekurangan air bersih/intrusi air laut, cuaca ekstrem) di kawasan pesisir kota Serang yang cukup tinggi 3. Tingginya kandungan polutan dari limbah industri, serta sampah yang berasal dari daerah hulu 4. Besarnya potensi kerusakan yang disebabkan oleh genangan air akibat abrasi dan naiknya permukaan air laut sebagai dampak dari perubahan iklim (meliputi lahan pertanian pangan abadi) 5. Belum optimalnya luasan sabuk hijau dikota Serang, baik yang berada di kawasan pesisir ataupun pada sempadan pantai Kota Serang 6. Belum optimalnya kegiatan rehabilitasi dan pengelolaan ekosistem Mangrove yang sudah dilakukan saat ini
4	Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Serang	
5	LPPM Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana UNTIRTA	
6	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten	
7	Kelompok Pecinta Alam Pesisir Pulau Dua (KPAPPD)	

Sumber: Wetlands International Indonesia (2017)

Melihat dari akibat deforestasi hutan Mangrove maka langkah awal yang dilakukan oleh WII adalah mengadakan komunikasi melalui tahap awal yaitu lokakarya yang bertajuk "penguatan kebijakan daerah untuk perlindungan ekosistem Mangrove Kota Serang" acara tersebut dihadiri oleh beberapa *stakeholders'* yang diadakan di Hotel Amaris Kota Serang pada 19 Oktober 2017. Hal tersebut didasari oleh fakta yang terjadi bahwa ekosistem Mangrove di Kota Serang mengalami kerusakan sehingga akan menambah permasalahan kebencanaan lingkungan hidup yang ada di pesisir Kota Serang. Perlindungan terhadap ekosistem Mangrove ini dapat dilaksanakan apabila terdapat kesepahaman antara satu dengan lainnya juga dilahirkan dari rasa percaya antar *stakeholders.* Berdasarkan sajian data tersebut terlihat bagaimana masyarakat butuh bantuan selain dari dukungan kebijakan melainkan dukungan pendanaan karena hal tersebut tentu mempengaruhi proses perjalanan dalam merehabilitasi lingkungan hutan mangrove yang telah rusak sehingga disampaikan bahwa dukungan dari pemerintah terhadap ketersediaan dana juga akan berdampak pada upaya perlindungan hutan Mangrove yang ada di Kota Serang.

Salah satu kegiatan yang telah dilakukan oleh Ketua Kelompok Pecinta Alam Pesisir Pulau Dua (KPAPPD) dengan bekerja sama dengan WII dan juga instansi pemerintah dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5. Program Stakeholder Konservasi Mangrove di Kota Serang

No	*Program Kerja sama*	*Metode*	*Hasil/Manfaat*
1	Menanam Mangrove Sepanjang Pesisir Pantai Kota Serang (35 Hektare)	Metode Silvofishery (Bibit Mangrove ditanam)	Membuat *green belt* pelindung cagar alam
2	Menanam Mangrove di Tambak kerja sama dengan *Wetlands International Indonesia* (35 Hektare)	Metode Silvofishery Bibit Mangrove di taman di pinggir kolam tambak)	Rehabilitasi Pohon Mangrove di Tambak yang mengalami kerusakan Manfaat: • mendapatkan nilai salinitas air tambak yang optimal sekitar 20-26% yang awalnya berkisar di angka 40%. • tanaman mangrove yang tumbuh besar dapat digunakan sebagai mitigasi perubahan iklim • tanaman mangrove akan menjadi sumber makanan ikan.

Sumber: Hasil Olah Data dari Badan Litbang (2020)

Selain itu, terdapat beberapa upaya dari Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Lingkungan Hidupnya yaitu antara lain:

Tabel 6. Program Pemerintah Kota Serang terkait Upaya Konservasi Hutan Mangrove

No	*Nama Program*	*Rincian Kegiatan*
1	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan	Menyusun rencana perlindungan sert pengelolaan lingkungan hidup pad

	Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	sub urusan perencanaan lingkunga hidup (UU No 23 Tahun 2014 huruf k)
2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Kajian lingkungan hidup untuk kebijakan, rencana, dan program lingkungan hidup tingkat provinsi sub urusan pemerintahan KLHS
3	Menyusun Strategi pengembangan kawasan lindung	Perwujudan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang dengan mengamankan, memelihara, dan mengembangkan hutan mangrove sebagai pengamanan terhadap abrasi dan erosi pantai
4	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Amanat UU Nomor 27 tahun 2007 yang mewajibkan penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
5	Lokakarya DLHK Serang dengan WII terkait penguatan Kebijakan Daerah untuk perlindungan Ekosistem Mangrove Kota Serang	Acara dihadiri 50 peserta yang terdiri dari OPD Kota Serang dan Provinsi Banten, Kelompok Masyarakat, Akademisi, dan Pemerhati Lingkungan dan Kebencanaan, sektor Swasta, dan LS se Kota Serang dengan tujuan untuk penyusunan produk hukum daerah terkait rehabilitasi dan pengelolaan ekosistem mangrove di Kota Serang.
6	Peningkatan Kapasitas dalam Rangka Mendukung Rehabilitasi Mangrove	Acara diselenggarakan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. World Bank, dan PT Hatfield Indonesia dengan peserta OPD Kota Serang, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dlam rangka rehabilitasi dan konservasi mangrove

Sumber: Hasil Olah Data dari DLH Provinsi Banten (2020)

Dari beberapa gambaran tersebut sebenarnya masih banyak beberapa program yang lain yang dilakukan. Tabel diatas tersebut menjelaskan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pihak LSM dan juga industri dalam

mencoba menjaga ekosistem mangrove dengan upaya merehabilitasi hutan mangrove dengan berbagai metode baik penanaman benih, penggunaan jembatan bambu dalam pengangkutan benih, dan berbagai metode lainnya. Selain dari pemerintah dan juga organisasi dalam upaya konservasi hutan mangrove, beberapa pelaku industri juga melalukan kegiatan atau program sebagai bagian dari *collaborative governance* dalam upaya konservasi hutan mangrove di Kota Serang sebagai berikut:

Tabel 7 Kegiatan Pelaku Industri terkait Konservasi Mangrove di Kota Serang

No	*Nama Program*	*Rincian Kegiatan*
1	Penanaman 3.00 Pohon dalam Rangka Memperingati Hari Bumi (2019)	Kegiatan tersebut dilakukan bersama dengan DLHK Provinsi Banten, DLHK Kota Serang, KPAPPD Serang, WII dengan konsep penghijauan sehingga peran penting mangrove sebagai jinservasu lingkungan hidup maupun perekonoian masyarakat pesisir pulau dua kota sernag (CSR ASTRA Tol Tangerang-Merak)
2	Penanaman di Wilayah Pesisir dan Laut Teluk Banten	Bersama dengan Rekonvasi Bhumi melakukan penanaman mangrove secara rutin bersama Nippon Shokubai Co., Ltd yang bekerjasama penanaman mangrove di pesisir Teluk Banten sampai dengan 2024
3	Penamaman Mangrove di sekitar lokasi wilayah Pesisir dan Laut Teluk Banten (2006-2014)	Kegiatan ini dilakukan bersama dengan Forum Masyarakat Pemuda Pesisir Pncer (FMP3), PT Apexindo Duta Pratama, PT Asahimas Chemical, PT Pratama Abadi Industri dengan menanam sebanyak 100.000 batang dan bibit cadangan sebesar 26.800 batang.
4	Penanaman Konsentrasi Penanaman Mangrove dialihkan ke garis pantai Pesisit Teluk Banten (2015-2020)	Kegiatan ini dilakukan bersama dengan Pelabuhan Perikanan ± 100 hektar. Berusahaan yang terlibat adalah PT Styrindo Mono Indonesia, Nippon Shokubai Co., Ltd, PT Lurch Sira, dan PLN Persero Unit Induk Distribusi Banten.

5	Penanaman 8.000 Mangrove di Kota Serang Banten (2022)	Kegiatan ini dilaksanakan memperingati Hari Mangrove Sedunia di prakarsai oleh Mahasiswa KKN PPM UGM bersama dengan PT Lestari Banten dan Indonesia Power dengan tujuan untuk mencegah terjadinya abrasi dan erosi pantai.

Sumber: Hasil Olah Data dari Berbagai Sumber (2023)

Bagian terpenting dapat dilihat dari adanya output yang ada. Hal ini menjadi suatu proses yang paling kritis serta esensial dalam mengembangkan momentum dalam keberhasilan suatu kerjasama (Ansell & Gash, 2008). Pemerintah Provinsi Banten telah membentuk kolaborasi bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, LSM, dan juga masyarakat yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 522.75.05/Kep.81-Huk/2019 tanggal 1 Februari 2019 yang dinamakan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD). KKMD Provinsi Banten diketuai oleh Kepala DLHK Provinsi Banten yang dibantu oleh Dewan Pakar dan Kehormatan yang terdiri dari OPD Provinsi, Perguruan Tinggi, dan TNI Angkatan Laut. Sedangkan terdapat tim teknis yang dibagi menjadi 4 bidang dan anggota yang tediri dari perwakilan OPD Prov Banten dan Kab/Kota serta instansi vertikal dan LSM (BAPPEDA Prov Banten, 2019).

Dalam menindaklanjuti studi kelayakan DLHK Provinsi Banten, perwakilan dari DLH Kota Serang menjelaskan bahwa Walikota Serang telah mengirimkan surat kepada Gubernur Banten pertanggal 1 Februari 2019 perihal persetujuan lokasi mangrove center di Kelurahan Sawah Luhur Kasemen. Lokasi yang diusulkan dengan rincian luas 20 Ha dimana 14 Ha sebagian sudah dilakukan penanaman sekitar 90.000 batang serta sisanya masih berupa tambak. Selain itu, dilakukan pembahasan Konsep Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara pemerintah Provinsi Banten dengan pemerintah Kota Serang untuk pengelolaan Mangrove Center yang beberapa pasal mencakup ruang lingkup dan pembiyaan (BAPPEDA Prov Banten, 2019).

Dari pemaparan diatas dapat digambarkan bahwa antara WII dan Pemerintah telah berkomitmen melalui program atau kegiatan nyata serta hasilnya adalah selain lahirnya beberapa kebijakan daerah yang akan dibahas pada bahasan selanjutnya namun pada bagian ini hal yang disorot adalah terbentuknya Kelompok Kerja Mangrove Derah (KKMD) melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor 522.75.05/Kep.81-Huk/2019 tanggal 1 Februari 2019 yang terdiri dari DLHK Provinsi Banten, DLH Kota Serang, TNI Angkatan Laut, Akemisi, LSM, dan juga OPD Kota Serang.

Munculnya Aktor Lokal sebagai Dampak dari *Collaborative Governance* Konservasi Hutan Mangrove di Kota Serang

Munculnya aktor lokal sebagai salah satu bagian dari *output collaborative governance* dimana kerjasama yang dilakukan oleh antar aktor dapat menghasilkan aktor lokal baru untuk kemudian melanjutkan program atau kebijakan yang telah tersusun dengan baik beserta tujuan-tujuan dan hasil-hasil yang diharapkan. Berdasarkan lima tahapan *collaborative governance* yang telah dijabarkan sebelumnya, mampu melahirkan aktor lokal untuk kemudian melanjutkan konservasi mangrove, disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 1. Skema Aktor Lokal yang Muncul

Sumber: Peneliti (2023)

Kelompok Sadar Wisata Mangrove Jembatan Pelangi Serang lahir sebagai suatu dampak yang ditimbulkan akibat adanya abrasi pada lingkungan di pesisir hutan mangrove, yang mana tambak-tambak masyarakat terkena dampak sehingga munculnya kesadaran untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tersebut salah satunya dengan penanaman mangrove. Selanjutnya, pemerintah daerah provinsi kemudian memperbesar jangkauan dari tujuan tersebut dengan melahirkan aktor lokal baru yang disebut dengan kelompok KUBE Mandiri Lontar. Kelompok ini bergerak pada bidang koservasi yang mana selanjutnya pada tahun 2018 terdapat beberapa instansi yang ingin memulihkan pantai di wilayah Serang salah satunya di Desa Lontar. Salah satu bentuk kerjasama tersebut yaitu salah satu perusahaan BUMN ingin memberikan bantuan dalam bentuk *landmark* namun pada dasarnya hal tersebut bertentangan dengan apa yang dirasa oleh kelompok kedepan dapat merusak alam sehingga dilakukanlah negosiasi untuk kemudian membuat *tracking* mangrove dengan tujuan agar dapat mendukung fungsi ekologis serta ekonomis dari mangrove. Namun terdapat beberapa tantangan aktor dalam upaya konservasi hutan mangrove yaitu:

Pertama, kendala terkait sosial ekonomi dimana beberapa hal dalam kendala ini adalah alih fungsi lahan berkaitan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang membuat kebutuhan dari masyarakat tentu semakin meningkat. Semakin sempitnya lahan mangrove misalnya dari pembangunan tambak dan pembangunan permukiman seringkali tidak memperhatikan kondisi dari lahan serta tata letaknya terhadap kawasan mangrove. Hal ini membuat konservasi mangrove akan mengalami tantangan mengarah kepada kegagalan karena daya dukung lahan untuk mendukung kehidupan mangrove semakin menipis. Selain alih fungsi lahan, tekanan dari penduduk kepada lahan dalam hal sumber daya mangrove yang kemudian di eksploitasi tidak sesuai dengan waktunya akan mengurangi keberhasilan rehabilitasi, hal ini terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak waktunya. Dibutuhkan situasi dan regulasi yang tegas terkait dengan pola pemanfaatan ekosistem mangrove yang kemudian ramah lingkungan.

Kedua, terkait dengan Sumber Daya Manusia serta Partisipasi Masyarakat dimana pada bagian ini terdapat peran penting dalam pelestarian hutan mangrove sebagai suatu sarana untuk pengurangan resiko bencana serta pelaksana kegiatan rehabilitasi. Sumber daya manusia dan perannya adalah membangun, menjaga, serta mengelola dimana pemanfaatan berkelanjutan dengan kemudian tetap memperhatikan sumber daya manusia menjadi hal yang sangat dibutuhkan.

Selain dua faktor itu, kondisi alam pun mengalami perkembangam yang bisa jadi menjadi kendala seperti perubahan ekosistem dimana terjadi regenerasi alami pada hutan mangrove dimana perubahan ekosistem bisa jadi diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti tambak yang terlantar, penebangan, dan juga aktivitas alam seperti suhu terlalu tinggi dimana suhu perairan yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi pada saat misalnya awal penanaman terhadap fisiologis tumbuhan. Kemudian terdapat beberapa hal teknis dalam pemerintahan seperti kehadiran legalitas hukum serta penegakan yang rendah dapat berakibat terhadap kegiatan illegal perusakan mangrove. Selain itu, rendahnya pengetahuan mengenai konservasi mangrove juga berdampak terhadap upaya konservasi mangrove ke depan. Kendala aktor lokal kedepan adalah mengenai pengawasan serta upaya keberlanjutan dari program yang telah dibuat sehingga seringkali upaya keberlanjutan program tidak diperhatikan yang menyebabkan kendala bagi para aktor dikemudian hari.

Pada bagian analisis data telah dijelaskan mengenai kendala yang akan dihadapi aktor lokal seperti faktor dari alam dan juga aktivitas manusia. Faktor dari alam dapat berupa

kenaikan suhu, abrasi, dan kerusakan lainnya yang kemudian keadaan tersebut harus menimbilkan kesadaran akan upaya pencegahan sejak dini. Terkait dengan aktivitas manusia juga dapat berupa penyempitan lahan akibat adanya pembangunan seperti pembangunan tambak dan juga pembangunan permukiman dengan tidak memperhatikan aspek alam seperti keberlanjutan konservasi mangrove yang nanti dihadapkan pada kondisi lahan semakin menyempit serta konservasi mangrove menjadi gagal. Selain itu, dalam hal teknis terkait kebijakan adalah kehadiran payung hukum dan juga penegakannya juga berdampak terhadap aktivitas yang merusak konservasi mangrove. Rendahnya pengetahuan mengenai upaya kosenservasi dari masyarakat pun dapat berdampak terhadap perusakan kawasan mangrove. Dan terakhir terkait dengan pengawasan dan keberlanjutan program yang telah disusun terhadap mangrove namun konsistensi dan komitmen untuk melanjutkan tidak terjadi maka tetap akan dihadapkan pada kondisi yang sama.

KESIMPULAN

Collaborative Governance dalam konservasi mangrove di Kota Serang dalam upaya rehabilitasi mangrove dari dampak kerusakan yang telah ditimbulkan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Serang, Wetlands International Indonesia, Kelompok Pecinta Alam Pulau Dua, Rekonvasi Bhumi, Masyarakat, dan Swasta sudah optimal dikarenakan telah menemukan kesamaan tujuan yaitu untuk menjamin keberlangsungan lingkungan hidup yang dilakukan dengan berbagai program seperti edukasi, pendidikan, penelitian, kajian, penanaman, dan bentuk kerjasama lainnya.

Selain itu, upaya pemerintah juga dalam membentuk Kelompok Kerja Mangrove Daerah melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor 522.75.05/Kep.81-Huk/2019 tanggal 1 Februari 2019 sebagai bentuk sinergi antar stakeholder secara terpadu dalam upaya konservasi mangrove. Hal ini juga dibarengi dengan rencana lahirnya BMC (Banten Mangrove Center). Namun hal ini harus semakin dipercepat karena pembangunan tersebut mendukung terhadap upaya rehabilitasi mangrove agar proses tersebut dapat dilakukan secara terpadu.

Dalam *collaborative governance* juga menggunakan lima proses Ansell & Gash (2008) antara lain: *face to face dialogue* yang dilakukan dengan pertemuan langsung melalui lokakarya antara stakeholder dengan tujuan melahirkan penguatan kebijakan daerah dan lahirnya produk hukum. *Trust building* dengan membangun kepercayaan antar *stakeholder* yang terkait dengan kebersamaan dan kepercayaan antar stakeholder melalui

kesamaan tujuan serta pembentukan KKMD. *Commitment to process* dilakukan dengan cara membentuk kerjasama yang komitmen yang dilakukan dengan berbagai program bersama setiap stakeholder dengan tupoksi masing-masing. *Share understanding* dilakukan dengan cara kesepahaman bersama untuk melakukan rehabilitasi mangrove. Dan terakhir *intermediate outcomes* lahir dari berbagai kebijakan seperti Perda 8 tahun 2020 Kota Serang yang mengamanatkan agar hutan mangrove dikonservasi serta mengindari aktivitas yang dapat merusak mangrove. Terkait dengan proses konservasi tersebut, dikaitkan juga dengan pembangunan berkelanjutan dengan memastikan generasi berikutnya dapat menikmati hasil rehabilitasi mangrove ini. Cara yang digunakan dengan pemerintah adalah menggunakan metode *silvofishery* yang tidak mengkonversi serta membahayakan ekosistem mangrove.

REFERENSI

Ansell, & Gash. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*.

Astari, M., Mahsyar, A., & Parawangi, A. (2019). KOLABORASI ANTARORGANISASI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN MODA TRANSPORTASI DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS KENDARAAN BECAK MOTOR). *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, *1*(1).

Badan Litbang dan Inovasi. (2020, December 13). *Padat Karya Mangrove Kota Serang: Pulihkan Ekonomi Warga serta Cegah Kerusakan Cagar Alam*. Hijau Memantau. http://pen.menlhk.go.id/detail/45

BAPPEDA Prov Banten. (2019, August 30). *Menanti Terwujudnya Banten Mangrove Center-Website Resmi Pemerintah Provinsi Banten*. https://bappeda.bantenprov.go.id/menanti-terwujudnya-banten-mangrove-center

Biro Pemerintahan Prov Banten. (2019). *Hutan Mangrove di Banten Rusak Hingga 60 Persen - Website Resmi Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten*. https://biropemerintahan.bantenprov.go.id/post/Hutan-Mangrove-di-Banten-Rusak-Hingga-60-Persen

Charalabidis., Yannis., & Koussouris. (2012). Empowering Open and Collaborative Governance. *Heidelberg: Springer*.

DLHK Prov Banten. (2020). *Laporan Akhir Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020*. http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/buku_IKPhd_BANTEN-2020.pdf

Dwiyanto, A. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik; Peduli, Inklusif*

dan Kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Gunawan, A., & Ma'ruf, F. M. (2020). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA MERESPON PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT LALU LINTAS (STUDI PADA RADIO SUARA SURABAYA DAN KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR SURABAYA). *Journal of Public Sector Innovation*, *8*(2).

Kabar Banten. (2019, April 25). *Peringati Hari Bumi, Astra Tol Tangerang-Merak Tanam*

kabarbhumi. (2021, March 4). *Mangrove di Teluk Banten*. http://www.kabarbhumi.org/2021/03/mangrove-di-teluk-banten.html

KEHATI. (2021, September 22). *Dukung Target Penambahan Hutan Mangrove, KEHATI dan Asahimas Tanda Tangani Kesepakatan Program Mangrove Blue Carbon – KEHATI*. https://kehati.or.id/dukung-target-penambahan-hutan-mangrove-kehati-dan-asahimas-tanda-tangani-kesepakatan-program-mangrove-blue-carbon/

KKP. (2021). *KKP | Kementerian Kelautan dan Perikanan*. https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4284-kondisi-mangrove-di-indonesia

Lestari, A. T., Priyanto, B. E., Fitriyanto, D., Kuswantoro, Rahadian, A., & Vidyan, S. (2018). *Kajian Risiko Bencana Pesisir*.

Miasto, Y. (2010). *Kajian Potensi dalam Pengembangan Silvofishery di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung*. Intitut Pertanian Bogor.

Osmaleli., Kusumastanto, T., & Ekayani, M. (2014). *Analisis Ekonomi Keterkaitan Ekosistem Mangrove Dengan Sumber Daya Udang (Studi Kasus: Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu)*. Journal of Agriculture, Resource and Environmental Economics 1(1): 61–70.

Saputro, C. (2020, July 26). *Silvofishery, Alternatif Pelestarian Hutan Mangrove - Mongabay.co.id : Mongabay.co.id*. MONGABAY. https://www.mongabay.co.id/2020/07/26/silvofishery-alternatif-pelestarian-hutan-mangrove/

Serang Kota. (2019). *Visi dan Misi - Portal Pemerintah Kota Serang*. Serangkota.Go.Id. https://serangkota.go.id/pages/visi-dan-misi

Sutiyan, Juanda, and Suarni Syam Saguni. 2016. "*Representasi Kerusakan Lingkungan Di Indonesia Dalam Puisi Media Daring Indonesia (Kajian Ekokritik)*." 27(6): 1384–1401.

WETLANDS INTERNATIONAL. (2012). Warta Konservasi Lahan Basah. *WKLB*, *20*(1).

Wetlands International Indonesia. (2010). "*Pelestarian Lahan Basah-untuk perubahan iklim-.*" *2*.

Wetlands International Indonesia. (2017, October 20). *Siaran Pers: Lokakarya Penguatan kebijakan Daerah untuk Perlindungan Ekosistem Mangrove di Kota Serang - Wetlands International*

Indonesia. Wetlands International. https://indonesia.wetlands.org/id/berita/siaran-pers-lokakarya-penguatan-kebijakan-daerah-untuk-perlindungan-ekosistem-mangrove-di-kota-serang/